

**TINJAUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 1980 DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA *MATCH FIXING* DALAM DUNIA SEPAKBOLA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh

**FATHUL BARY**

**NIM. C93215058**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : FATHUL BARY  
NIM : C93215058  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2019

Saya yang Menyatakan



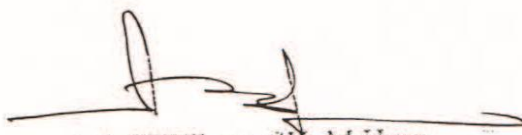
  
FATHUL BARY  
NIM. C93215058

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh FATHUL BARY NIM. C93215058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09. Juli 2019

Pembimbing Skripsi,



Arif Wijaya, SH., M. Hum

NIP. 197107192005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh FATHUL BARY NIM.C93215058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah.

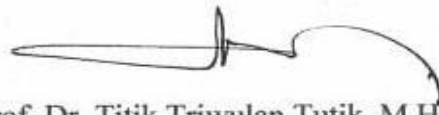
### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Arif Wijaya, SH.,M.Hum  
NIP. 197107192005011003

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H  
196803292000032001

Penguji III



Mahir, M.Fil.I  
197212042007011027

Penguji IV



Nurul Asiya Nadhifah, M.HI  
197504232003122001

Surabaya, 08 Agustus 2019  
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FATHUL BARY  
NIM : C93215058  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [barryulfath@gmail.com](mailto:barryulfath@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MATCH FIXING DALAM  
DUNIA SEPAKBOLA DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2019

Penulis  
  
(FATHUL BARY)

## ABSTRAK

Penelitian dalam bentuk skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* Dalam Dunia Sepakbola Di Indonesia”, hal ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah : 1) Bagaimana Analisis Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum *Rishwah* Terhadap tindak pidana *Match Fixing* dalam dunia sepakbola di Indonesia?

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap serta peraturan-peraturan dan data sekunder yaitu buku-buku, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum dan artikel hukum yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*)

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pelaku tindak pidana *match fixing* yang di lakukan di Indonesia akan dikenai undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap yakni dalam pasal 3 dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).. Sedangkan aparat negara yang terbukti melakukan tindak pidana *match fixing* akan dijerat dengan undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi pada pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian di tegaskan dalam Islam bahwa haram bagi umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatarbelakanginya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap muncullah permainan hukum pemutarbalikan fakta.

Harus adanya penegakan hukum terhadap pemain sepakbola, wasit serta perangkat pertandingan dalam sepakbola sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan peran polisi serta masyarakat yang harus melihat sepakbola itu tidak hanya pertandingan akan tetapi sepakbola itu sendiri ada hukum yang mengatur secara rinci sesuai undang-undang di Indonesia. Dalam Hukum Pidana Islam Tindak pidana suap dikenai sanksi takzir berdasarkan kemaslahatan sedangkan pelaksanaannya diserahkan dalam Ijtihad para hakim.



## DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi operasional.....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II TINDAK PIDANA <i>MATCH FIXING</i> MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	       18





## PENDAHULUAN

Sepakbola merupakan olahraga yang beragam nan unuk, yakni perpaduan antara keterampilan, fanatisme, seni, kekerasan, emosi. Tidak ada olahraga lain yang suasananya berlangsung begitu tegang yang dibalut dengan luapan emosi, kekerasan, serta hura-hura. Baik itu penonton, pelatih maupun para official yang terlibat secara aktif melalui emosi dan ketegangan. Dari sudut bangku penonton sendiri terdengar cacian, tawa yang keras, music yang bisa jadi memecahkan telinga. Adu jotospun kemungkinan besarpun bisa terjadi begitu sajadan itupun sudah biasa terjadi.<sup>1</sup>

Manusia pada dasarnya harusnya adalah mampu bersyukur dan menerima apayang telah diberikan Tuhan kepadanya karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu dengan kekurangan. Pada tiap manusia yang walaupun dilahirkan dengan beberapa kekurangan, namun disamping itu Tuhan selalu memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lainnya.

Olahraga telah dipandang memiliki berbagai fungsi yang tidak hanya untuk mengembangkan kualitas kebugaran fisik saja, melainkan juga mengembangkan kualitas mental individu dan masyarakat secara lebih utuh dan

<sup>1</sup> Tjipta Lesmana, *Politik Bola dan Bola Politik Kenama Arah Tendangannya?* (Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama, 2013), 67.

Para ahli menyatakan bahwa olahraga pada umumnya mencerminkan nilai-nilai yang menjadi rujukan masyarakat. Selain itu, olahraga juga merupakan suatu arena hiburan yang menyuguhkan keterampilan, dan pada saat bersamaan seseorang dapat belajar tentang nilai inti kebudayaannya.

Olahraga salah satunya cara mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada hambanya, Olahraga merupakan aktivitas yang apabila dilakukan dapat memberikan efek yang baik bagi tubuh yakni tubuh menjadi sehat baik secara rohani maupun jasmani. Olahraga merupakan alternatif terbaik bagi tubuh agar tidak kaku dan dapat mencegah dari segala penyakit. Karena tubuh kita diciptakan dengan struktur yang sangat sempurna dalam menjalani aktivitas, tetapi terkadang tidak kita sadari bahwa terkadang kita terlalu memperhatikan stamina tubuh yang tidak terurus sehingga terkadang tubuh terasa tidak fit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya berolahraga secara rutin.

Sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari dibandingkan olahraga yang lainnya, khususnya untuk di Indonesia sepakbola menjadi hiburan masyarakat yang paling banyak mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari

Sepak bola yang sudah ada sejak lama di Indonesia dan menjadi salah satu olahraga terbesar yang paling diminati menjadi sebuah hiburan tersendiri dan menjadi wadah untuk berteman dengan orang dari kebudayaan yang lain. Banyak orang Indonesia gemar bermain sepak bola sehingga banyak muncul klub-klub profesional dan kejuaraan di Indonesia. Klub yang ada di Indonesia pun beragam dari banyak wilayah dan banyak pemain dari klub terdiri dari beragam orang dari Indonesia.

[illegible]

Beberapa macam jenis olahraga yang ada yang digerakkan oleh suatu lembaga negara yang dipertontonkan dihadapan khalayak ramai (pertandingan), seperti halnya di Indonesia sepak bola dimana olahraga ini merupakan salah satu jenis olah raga nasional yang banyak peminatnya baik kalangan remaja maupun lanjut usia. Ada beberapa pertandingan laga antar *club* yang saling bersaing untuk meraih sukses di dunia olah raga.

Sepakbola termasuk salah satu olahraga favorit masyarakat global. Dari sejak jaman dahulu sampai saat ini sejarah sepakbola dunia hampir tidak pernah mengalami fase kemunduran meskipun terkadang ada dinamika serta problematika perjalanan olahraga tersebut, tanpa terkecuali masalah pengaturan skor (*match fixing*). Pengaturan skor yang semakin Tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut untuk ditindaklanjuti secara serius oleh

[illegible]

seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, karena suara yang semakin nyaring membicarakan hal tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu cara yang sekarang ini sedang ramai diperbincang adalah pengaturan skor dan permainan para mafia sepakbola Indonesia. Walaupun sudah menjadi cerita lama, tapi banyak kasus dalam realitanya hanya mengambang dan tanpa penyelesaian.

Berhubungan dengan tindak pidana *match fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, bahwa ada suatu hal yang perlu dimengerti yang mengenai tidaka kriminal ini merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai tindakan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat di pidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>5</sup> Di sisi lain, tindak pidana ini dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Luthfy Avian Ananda, *Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, [https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalamsepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana\\_5693d48e119773750970f220](https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalamsepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana_5693d48e119773750970f220), diakses tanggal 22 Maret 2019.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

<sup>6</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 3.

Pengaturan skor di Indonesia sendiri, sudah tidak asing lagi. Bahwa seringkali ajang pertandingan sepakbola hasilnya tidak memuaskan (janggal) dan tidak seperti biasanya, karena dari kedua tim atau salah satu pemain tidak bermain seperti biasanya ataupun si wasit di anggap berpihak pada satu tim, judi bola melalui pengaturan skor akhir pertandingan, permainan terkait transfer pemainn dari satu klub ke klub lain.<sup>7</sup>

Kebijakan tindak kriminal merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perUndang-Undangan. Pada hakikatnya, kebijakan tindak kriminl merupakan

<sup>8</sup> Ibid.



Sesuatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana baik dari segi delik aduan ataupun delik biasa, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Serta tindak pidana penyuapan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap telah dijelaskan secara pasti menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan “barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

<sup>9</sup> Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2008), 2-3.

Berdasarkan latar belakang tersebut dari data-data yang sudah di paparkan tadi, maka peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap penelitian ini.

### B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Bagaimana Cara menemukan gejala-gejala tindak pidana *matchc fixing*.
2. Implementasi Undang-Undang sistem keolahragaan nasional No. 3 Tahun 2005 terhadap tindak pidana terhadap pelaku pelanggaran pengaturan skor (*Match Fixing*).
3. Dalam hukum Islam belum ada yang membahas kasus *Match Fixing*.

4. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dalam menanggulangi kriminalitas *Match Fixing* yang sudah di anggap sudah tua.

Dalam beberapa persoalan itu penulis tidak akan menulis semua hanya saja penulis akan membahas beberapa permasalahan yang di anggap penting untuk dibahas lebih dalam lagi, maka muncullah dua pembahasan penting bagi penulis.

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang sudah si anggap tua.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *match fixing*.

### C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum *Rishwah* Terhadap tindak pidana *Match Fixing* dalam dunia sepakbola di Indonesia?



Dalam penelitiannya tersebut hanya membahas tentang pengungkapan berita surat kabar tribun jogja yang di anggap tidak menjelaskan secara rinci kasus yang mereka beritakan seolah-olah kabar in tidak beriskap netral terhadap salah satu club.<sup>11</sup> Sedangkan perbedaan yang akan di bahas dalam penelitian ini lebih fokus terhadap tindak pidana pelaku pengaturan skor dan kemudian membahas tindak pidana pengaturan skor dari sudut pandana positif dan hukum pidana Islam.

3. Penelitian yang ditulis oleh Nandy Wahyu Permadi (51416047) mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Madiun dengan judul skripsi “*Kasus Dugaan Pengaturan Skor Dan Permainan Mafia Liga 1 Sepakbola Indonesia Yang Terbongkar. Pssi Bisa Apa?*” dalam penelitiannya tersebut lebih

[illegible]

Penelitian ini berfokus pada kritik terhadap kinerja PSSI dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara olahraga di Indonesia, Sedangkan perbedaan yang akan di bahas dalam penelitian ini lebih fokus terhadap tindak pidana pelaku pengaturan skor dan kemudian membahas tindak pidana pengaturan skor dari sudut pandang positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang no 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang sudah dianggap sudah tua.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *match fixing* dalam dunia sepakbola yang terjadi di Indonesia.

[illegible]



## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis:

Dijadikan sebagai kerangka berfikir atau masukan dalam perspektif Hukum Pidana Islam sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat melancarkan dalam hal penelitian tentang pencurian. Selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana *match fixing*.

2. Secara praktis:

Hasil penelitian ini dapat kita pelajari lebih lanjut mengenai aspek hukum yang sesuai dengan keadaan dan bisa memberikan keadilan yang sebenarnya.

## G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran suatu pembahasan yang akan dikaji, perlu adanya pendefinisian tentang judul yang bersifat operasional dalam penyusunan skripsi ini supaya lebih mudah untuk memahami secara jelas dan dapat mudah memahami dengan mudah.

1. Hukum Positif merupakan suatu aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dan membedakan baik buruknya suatu perbuatan. Kemudian dibentuklah suatu kaidah yang mengatur hubungan manusia demi terwujudnya keadilan bersama.

Dalam kasus ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pengertian Takzir menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberipelajaran atau pengajaran. Dalam hal ini sumber rujukannya menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta pendapat para ulama tentang tindak pidana suap dalam hukum pidana Islam.
3. *Match Fixing*: yakni penetapan pertandingan, suatu tindakan pengaturan skor pertandingan yang mana dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dengan cara mengelabui ketentuan Sistem Keohlaragaan Nasional baik dengan cara suap, pemalsuan dokumen, serta kecurangan-kecurangan yang dapat menguntungkan pihak terkait.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian Normatif adalah metode yang akan dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut metode penelitian yang akan di lakukan dalam penelitian ini antara lain:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan penelitian pustaka, bersifat deskriptif yang menekankan pada analisis dengan pendekatan Deduktif. Yakni sumber informasi yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

tentang tindak pidana suap serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, pendekatan fenomena problematika dalam dunia olahraga yang sering kita saksikan di televisi sebagai sumber bahan hukum.<sup>13</sup>

### 3. Data yang dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Deskripsi kasus tentang tindak pidana *match fixing* itu sendiri.
- Dasar pertimbangan Satgas antimafia bola
- Pendapat Ulama yang membahas penipuan dalam hukum pidana Islam

#### 4. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum diperlukannya sumber-sumber penelitian atau dalam penelitian hukum disebut bahan hukum. Anatar lain:

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif artinya punya otoritas. Sumber data yang digunakan penulis adalah:

<sup>13</sup> Dya Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119.

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*), antara lain:

- [illegible]







- c. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman tindak pidana *match fixing* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

## 7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan diskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif menggunakan data-data yang bersifat khusus yakni tentang tindak pidana suap, kemudian ditarik kepada permasalahan yang bersifat umum yakni tindak pidana penipuan dalam Hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dalam memahami pembahasan sekripsi penulis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

## Bab I

Merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam Bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

## Bab II

Merupakan landasan teori tentang pengaturan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1980, yakni teori keberadaan tindak pidana pengaturan skor dan teori Jarimah (Hukum Pidana Islam) yang dijadikan analisis masalah meliputi: pengertian, macam-macam, dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.

### Bab III

Memuat tentang pengertian, jenis-jenis motif pengaturan skor, peristiwa yang ada yang berhubungan dengan tindak pidana *match fixing*.

## Bab IV

Merupakan analisis Hukum Positif dan tinjain Hukum Islam Terhadap  
Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Olahraga di Indonesia

## Bab V

Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

## TINDAK PIDANA *MATCH FIXING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Konsep Tindak Pidana *Match fixing* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *Strafbaar Feit*, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata *Strafbaar Feit*.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>1</sup>

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan simonstentang pengertian dari strafbaar feit tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

Menurut Pompe *Strafbaar Feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*Strafbaar Feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 182

[illegible]

(pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sede-mikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.

Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya,

a. Unsur-unsur formal :

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

[illegible]



unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>4</sup>

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan

---

<sup>4</sup> Ibid., 117.

akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : jika orang itu jadi membunuh diri adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

Terkait tindak pidana suap sebenarnya sudah diatur juga Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana suap diatur dalam Pasal 209 ayat (1), yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan yakni Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam Ayat kedua pasal 209 KUHP berbunyi Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

[illegible]

Menurut Mudzakir menilai bahwa kasus pengaturan skor termasuk dalam kategori kejahatan lunak yang sangat sulit melakukan pembuktian terhadap setiap dugaan pengaturan skor. Berbeda dengan kasus suap seperti dalam perkara korupsi di mana penegak hukum bisa membuktikan kejahatan pelaku suap dengan data-data.

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

[illegible]

30

Selain jarimah, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, pengertian jinayah adalah:

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس وأموال

Artinya: Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.<sup>6</sup>

Pengertian jarimah menurut ahli nahwu sama dengan para fuqaha'yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehinggadisiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yangdiperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allahmenetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.

Menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menerangkan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975), 219.

<sup>6</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy* (Beirut: dar Al-Kitab Al-Araby), 67.

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidina Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil.



Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Selain unsur-unsur umum pada tiap-tiap jarimah, terdapat juga unsur-unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam-diam bagi jarimah pencurian.

Di bawah ini adalah uraian tentang jarimah dilihat dari segi beratringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

Jarimah Hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Jarimah hudud ialah jarimah-jarimah yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

Artinya : Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.

- Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni:<sup>8</sup>

- [illegible]

b. Jarimah Kisas dan *Diyat*

Yang termasuk dalam jarimah Kisas dan diyat diantaranya adalah:

- Baik Kisas maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan Kisas dan diyat merupakan

### c. Jarimah Takzir

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan nya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), xii.

36

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).

Keterangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh TopoSantoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* yang menyebutkan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (Takzir) didasarkan pada *ijma'* (*consensus*) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah Takzir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapikeadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.

#### 4. Tindak Pidana *Match Fixing* menurut Para Ulama

a. Pengertian *Rishwah*

Secara etimologi *Rishwah* berasal dari bahasa Arab رشا - يرشو- رشوة yang berarti “Menjulurkan kepala”.



“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum. (HR.At-Tirmidzi)

“Dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya”.

Ibn Abidin dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk *Rishwah*, yaitu:

- 1) Risywah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *Rishwah* untuk mendapatkan keuntungan dalam tingkat peradilan serta tingkat pemerintahan.
- 2) *Rishwah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, walaupun keputusan hakim tersebut itu dibenarkan, karena hakim tersebut pasti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).

[illegible]



- 3) *Rishwah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Rishwah* dalam hal ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *Rishwah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Kalau kita lihat dari sisi haramnya, karena substansinya adalah kedzaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan.
- 4) *Rishwah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang Muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

d. Syarat-syarat diperbolehkannya *Rishwah*

Hukum asal dari *Rishwah* adalah haram, dan dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut.<sup>14</sup>

- 1) Darurat; maksud dari darurat disini mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.

---

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor: Ulil Albaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2010), 77-81.

Dapat diamati bahwa definisi darurat menurut Imam Syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syaria, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri.

- 2) Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat di dzalimi.
- 3) Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan.
- 4) Untuk Mendapatkan masalahah *Rajihah* (riil) bukan *Dzoniyyah* (perkiraan).

- 5) Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senatiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.

e. *Rishwah* Dalam Fikih Islam

Ada beberapa macam ciri-ciri *Rishwah* dalam terminology syari'ah:

a. *Mushana'ah*

Kata *mushana'ah* memiliki arti melakukan sesuatu untuk orang lain, dengan tujuan supaya orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.

b. *Suht*

Kata *Suht* secara bahasa yaitu, segala sesuatu yang buruk dari bentuk-bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah, *Suht* berarti setiap harta haram yang tidak boleh di usahakan dan di makan. Dikatakan *Suht* karena harta ini dapat menghapus ketaatan dan menghilangkannya.<sup>15</sup> Kata *Suht* disebut di dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 42.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ٤٢

<sup>15</sup> Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Dar al-Shofwa; Mesir, 1427), 255.

Para ulama tafsir menafsirkan kata *Suht* yang menjadi kebiasaan Yahudi ini sebagai *Rishwah*. Namun demikian, kata *Suht* adalah lafaz yang masih bersifat umum, yaitu segala macam harta haram yang tidak boleh diambil dan dimakan, *Suht* meliputi riba, suap, rampasan, hasil judi, harta curian, ongkos pelacur, mahar tukang tenung, dan segala bentuk harta yang didapatkan dari jalan yang batil. Sementara *Rishwah* bersifat lebih khusus dan merupakan bagian dari *Suht*.

Sengertian *Hibah* menurut *Syara'* adalah akad pemberian harta milik yang diberikan kepada seseorang pada saat masih hidup, tanpa tujuan imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada



## TINDAK PIDANA *MATCH FIXING* DALAM DUNIA SEPAK BOLA DI INDONESIA

*Match Fixing* atau disebut juga sebagai pengaturan skor merupakan suatu pertandingan yang sudah di atur sedemikian rupa sehingga bisa kita ketahui hasil akhirnya baik pertandंगा yang sudah di atur atau bisa juga keseluruhannya. Akan tetapi, *match fixing* sangat menitik beratkan pada hasil akhir suatu pertandingan.

Berhubungan dengan tindak pidana *match fixing* dalam dunia sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Hal yang perlu di garis bawahi bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat di pidana menjadi perbuatan pidana dan itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja terhadap tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain tindak pidana yang dilakukan dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.<sup>1</sup> Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

44

Ada beberapa alasan terjadinya tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*) bisa terjadi, pada umumnya itu karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa uang atau barang-barang mewah lainnya yang dapat menarik perhatian seseorang untuk bisa memanipulasi hasil pertandingan baik dari segi pemalsuan dokumen pemain maupun disogoknya para pemain untuk mengikuti intruksi.

Pasal 2: Suap di definisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu

[illegible]





Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada pegawai, dengan harapan mendapatkan apa yang di inginkan dengan urusan yang mudah.

Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “memahami untuk membasmi” yang dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dijelaskan cakupan hukum suap adalah (1) setiap orang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Suap juga bisa di artikan setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal urusan tersebut tanpa pembayaran.

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pasal tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) merumuskan adanya unsur ‘merugian keuangan negara. Akan tetapi untuk kejahatan suap tidak masuk kategori merugikan keuangan negara, walaupun perilaku tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi.

Suap dalam berbagai bentuk banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok, dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau aparatur sipil negara. Dalam arti luas suap tidak hanya dalam bentuk uang saja, akan tetapi dapat juga

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik aparatur sipil negara, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan. Pemberian suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Pemberian suap pada hakektanya bertentangan dengan Norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan membahayakan keselamatan negara. Akan tetapi kenyataanya banyak perbuatan yang mengandung unsur suap belum ditetapkan sebagai perbuatan pidana, misalnya: pemilihan perangkat desa, penyuapan dalam pertandingan olahraga, dan lainnya sebagainya. Batasan untuk kepentingan umum di tegaskan dalam pasal 2,3 serta paragraph ke 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang suap, termasuk untuk kepentingan umum kewenangan dan kewajiban yang di tentukan oleh kode etik profesi atau ketentuan organisasi masing-masing.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Ibid., 33.

Konsep mala in prohibitia bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena perundang-undangan telah melarangnya, sehingga disebut juga sebagai *regulation offenses*. Tindak pidana suap merupakan *male per se* karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi agar disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Agus Budanto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), 5.

Dengan berlatar belakang suap pengaturan skor ini bisa diketahui dengan beberapa bukti berupa transfer uang dari rekening penjudi ke rekening pemain /ofisian /wasit mudah di temukan, ada juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, SMS, atau beberapa kontak lain juga dapat dijadikan bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut.

1. *Direct financial motivation*, yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian,
2. *Indirect financial motivation*, dalam kasus tindak pidana perjudian itu berkaitan dengan memanipulasi pertandingan, pelaku akan mendapatkan keuntungan ekonomi langsung melalui aktivitas perjudian ini. Dengan kekalahan suatu pemain juga dapat menguntungkan si pelaku tindak pidana tersebut.

1. Dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seorang atas yang lainnya.
2. Dibayar dengan permintaan, baik secara langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara yang dapat dipahami bahwa pemberi itu menginginkan sesuatu.



Bagaimana ketika pelaku wasit yang sudah di suap ketika memimpin sebuah pertandingan? Inilah beberapa modus oparandi yang dijalankan wasit kotor yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum:

- imana ketika pelaku wasit yang sudah di suap  
andingan? Inilah beberapa modus oparandi yang  
ebenarnya sudah menjadi rahasia umum:  
ikan hukuman keras, berupa kartu merah kepada p  
ndak di kalahkan, padahal pelanggaran yang dilal  
ormain kesebelasan yang mau di unggulkan melah  
na, hukumannya pun jauh lebih ringan dari sebelum  
an pluit “*offside*” kepada pemain yang nyaris  
an tajam ke gawang lawan. Ataupun sebalik  
menyarakkan kedalam gawang lawan, padahal po  
adaan *offside*.



- f. Dari kepengurusan PSSI dari level bawah tercatat NN yang pernah. Menjabat direktur salah satu komite. Di samping itu, ada beberapa karyawan yang dapat juga menentukan posisi klub yang akan bertanding. Misal: meminta masuk grup sesuai keinginan.
2. Modus Oparandi Mafia
- Menjelang pelaksanaan kompetisi para pengurus klub mulai berkeliaran mencari oknum yang akan membantu mengawal perjalanan ketika kompetisi.
  - Setelah dilakukan benbagian grub, di antara peserta kompetisi biasanya ada pembicaraan siapa yang akan menjadi wasit yang akan di pakai oleh klub yang bersanagkutan.
  - Oknum yang akan mengawal klub biasanya secara intensif berkunjung ke daerah yang menggunakan jasanya selaku mafia, atau juga dilakukan saat pertandingan agak krusial, karena lawan tergolong berat ataupun wasit yang belum bisa dipastikan dalam kendali.
  - Permainan curang yang paling sering terjadi ialah yang bertindak sebagai tuan rumah. Bila klub sedang tandang, dan tuan rumah agak lemah koneksinya biasanya ada istilah curu poin.
  - Apabila wasit nekat, ia sanggup menanggung resiko seperti dipukul massa, pemail, maupun di keroyok pengurus yang merasa di kerjai.



- f. Salah satu pemberian hadiah wasit kepada tuan rumah adalah pemain lawan diberi hukuman penalty karena *handball* atau pelanggaran di kotak penalty.
  - g. Cara lain dari tuan rumah kepada perangkat pertandingan (wasit dan pp) berupa hiburan malam seperti diskotik, kafe, massage, atau hiburan wanita (PSK). Yakni dilakukan sebelum digelarnya pertandingan.
  - h. Pelaksanaan dana dari klub pada pelaku mafia melalui transaksi *cash* tetapi melalui transfer bank.
3. Factor-faktor Suburnya Mafia Sepak Bola
- a. Kebutuhan suatu klub agar naik peringkat dengan cara apapun, khususnya karena desakan supporter.
  - b. Manajernya kebetulan pejabat daerah yang menggunakan sarana sepak bola untuk kampanye. Yakni menghalalkan segala cara yang penting klubnya naik peringkat, pejabat pun mendapat pujian dari para calon pemilih dalam suatu pilkada.
  - c. Ketidaktahuan atau tidak profesional para pengurus daerah dalam mengurus klub, sehingga mereka menjadi sapi peras oleh pengurus pusat.
  - d. Dari petugas pertandingan, bila wasit atau pp tidak mau mengikuti penentuan skor maupun menentukan pemenang oleh para oknum-oknum

e. Ada juga pelatih yang secara sengaja menjual poin klub didikannya semata-mata permintaan klub lawan karena kepentingan atau imbalan tertentu.

Kekuasaan politik secara Intrinsik memang membawa virus korupsi, hanya beberapa orang berkuasa yang tidak tertular virus korupsi. Modus operasi koruptor dimanapun sama, yakni dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperkaya diri atau membarter kekuasaannya dengan uang. Tidak sedikit pula anggota badan anggaran dewan perwakilan rakyat kita mempersulit pembahasan mata anggaran Instansi pemerintah. Tapi setelah adanya lobi-lobi dan nada “*Understanding*” antara menteri dan oknum-oknum badan anggaran, proses pembahasan pun cepat terselesaikan mencapai kesepakatan. Yang dimaksud “*Understanding*” adalah sejumlah uang yang disepakati bersama jumlahnya.<sup>10</sup>

[illegible]

Seorang kepala Kejaksaan Negeri di kota yang sebenarnya tidak besar, tidak lama setelah duduk di kursinya sedah datang seorang pengusaha. Sang pengusahapun langsung menawarkan rumah dan mobil yang dikehendakunya. “bapak tinggal pilih saja, mau tinggal dimana, dan mau mobil apa?” ujar si pengusaha.<sup>11</sup>

Uang dan materi itulah yang mengejar manusia, terutama mereka yang mempunyai kesempatan, kata Karl Marx. Sesungguhnya, manusia adalah *homo economicus*, insan yang tidak pernah puas dalam petualangannya memperkaya diri. Uang, kekuasaan dan uang sebenarnya tidak jauh berbeda, kekuasaan bisa menjelma menjadi uang. Sebaliknya, uang bisa menjelma kekuasaan formal, maka muncullah pameo yang kebenarannya sudah diakui semua kalangan disekolah belahan dunia, “*power is money*” and “*money is power*”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid., 54.

[illegible]



Adapun sebab-sebab timbulnya tindakan destruktif itu biasanya bermacam-macam, dengan maksud yang berbeda-beda pula. Mulai dari yang bermotif spontan, sampai dengan yang bertendensi politik. Karena itu, penanganannya harus bersifat komprehensif pula. Namun yang jelas, tindakan tersebut, sebagian besar nyaris dilakukan penonton, yang biasanya tidak puas terhadap hasil-hasil pertandingan maupun keputusan tertentu yang dijatuhkan wasit. Rasa kekesalan yang ditumpahkan secara spontan ini terkadang tidak terkendali, dan dalam ukuran tertentu menjadikan mereka beringas menghancurkan apa saja yang dihadapi.

[illegible]

Munculnya perilaku destruktif tersebut sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri, namun terkait dengan berbagai problem yang lebih kompleks, baik yang bersumber dari penonton, pemain, wasit, pengurus dan bahkan juga masyarakat luas. Penonton yang tidak disiplin dan kurang terdidik biasanya tingkat kesadarannya rendah dan mudah tersulut emosinya. Sedangkan pemain yang tidak menunjukkan mutu permainan yang bagus, tidak bermain secara fair dapat pula menjadi sumber konflik. Di samping itu, sikap dan keputusan para wasit serta hakim yang dinilai tidak adil dan obyektif berpotensi besar menyulut tindakan-tindakan destruktif itu.

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA *MATCH FIXING* DALAM DUNIA SEPAKBOLA DI INDONESIA

A. Analisis HukumHukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia.

Tindak Pidana *Match Fixing* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau berkelompok. Tindak pidana *Match Fixing* merupakan perbuatan yang dengan cara mengambil hak orang lain secara tidak adil, yakni dengan berlabel kedudukan sebagai pejabat atau oknum-oknum yang mempunyai kewenangan.

Bahwa suatu perbuatan pidana harus di selesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berupa undang-undang khusus yang mengatur hukuman tindak pidana tersebut sesuai masanya, KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), ataupun kewenangan hakim dalam memberi keputusan hukuman bagi sipelaku tindak pidana *match fixing* ini.

Dalam hal ini seorang pelaku bisa dikenakan undang-undang suap apabila sipelaku (baik penyuap atau pun yang di suap) merupakan bagian dari aparaturnya pemerintah yang sah secara hukum, yakni dengan adanya pelantikan yang disertai sumpah kesetiaan mengabdikan untuk negeri. Kemudian perbuatan sipelaku bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka

kemudian wajib dikenakan hukuman luar biasa (*extraordinary law*) karena sipelaku ini dikatakan pejabat hukum, merugikan negara, merusak kestabilan sistem keohlaragaan nasional secara menyeluruh.

Hal yang perlu dipahami adalah Undang-Undang Tipikor tidak tepat menjerat pelaku dan penerima suap dari pihak swasta, khususnya di dunia olahraga. Undang-undang Tipikor itu bersifat *lex specialis*, pengertian suap di sana adalah yang merugikan keuangan negara dan berlaku untuk kasus korupsi yang ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Guna menjerat pelaku dan penerima suap dari pihak manapun, tetap alangkah lebih baiknya untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang kelahirannya dipicu terjadinya perjudian dan *match fixing* di sepakbola pada masa lalu. Artinya bahwa ini bukan Undang-Undang yang digugurkan setelah lahirnya undang-undang Tipikor. Undang-undang ini bisa menjerat orang-orang yang terlibat suap, walau dia bukan bagian dari pemerintah atau penyelenggara negara. Undang-undang ini masih eksis dan bisa menjerat pihak lainya.

Beberapa kasus pengaturan skor di ranah olahraga Indonesia tidak berlanjut ke hukuman pidana, di mana gugatan pidana ini dinilai akan lebih efektif memerangi pengaturan skor dan judi dalam olahraga, selain sanksi yang dijatuhkan dalam olahraga itu sendiri.



Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah bicara unsur-unsur untuk terpenuhinya suatu delik, maka butuh ketelitian bagi para penyelidik dan penyidiklah menjadikan temuan-temuan hukum sebagai unsur delik, sebagai contoh suap dalam sepakbola yang melibatkan wasit, pemain atau pihak di luar sepakbola dapat dijerat pidana. Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

## Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

## Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.



membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Berkenaan dengan hal Bapak Andi Hamzah berpendapat bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diambil dari KUHP Belanda, di mana di Belanda ada pejabat negara maupun non pejabat negara ada, di Indonesia hanya ada pejabat negara, sedangkan non pejabat negara tidak diadopsi di dalamnya. Pada pemahaman ini, suap di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Hal tersebut bukan berarti tidak memiliki dampak sama sekali dalam penegakan peraturan tersebut. Justru tidak diaturnya ketentuan suap di sektor swasta pada Undang-Undang Tipikor memiliki keterkaitan dengan aktor yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan ketentuan tersebut. Singkatnya, seringkali penegakan hukum korupsi dikaitkan hanya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK hanya memiliki kewenangan dalam undang-undang korupsi, di luar itu bukan wewenang KPK. Jadi dalam Undang-Undang Nomor

Kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi solusi utama untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepakbola. Namun dalam keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang dianggap sudah cukup tua, sepertihalnya sanksi yang berkisar belasan juta yang dirasa sangat ringan di era sekarang, sementara modus operandi *match fixing* terus berkembang, maka alangkah lebih baiknya harus adanya terobosan-terobosan dan penemuan hukum atau *rechtsvinding* utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, karena dapat dijadikan preseden di kemudian hari, terlebih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.

## 1. Penetapan Hukum *Rishwah* (suap)

1) Ada barang bukti

Disetiap perkara pasti ada bukti-bukti yang menjelaskan perihal kejadian tersebut berupa bukti *otentik* baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

## 2) Ada saksi

Dalam hal ini dalam penyelesaian perkara minimal ada dua orang saksi yang mengetahui secara pasti dari kejadian. Dijelaskan dalam Al-Qur'an

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...”(Al-Baqarah - 282)

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa minimal adanya dua orang saksi laki-laki jika tidak ada maka boleh satu laki-laki dan dua orang perempuan.

## 3) Ada pengakuan dari pihak terkait

Suatu perkara dapat dipastikan terjadi jika ada pengakuan sendiri dari pihak terkait baik dari sipelaku maupun korban. Pengakuan tersebut bisa diterima apabila yang bersangkutan sudah *Mukallaf* (dewasa).

## 2. Hukum Takzir Bagi Penyuap, Penerima, serta Perantara yang Lainnya

Dalam hal ini hukuman sanksi bagi pelaku kejahatan tindak pidana suap ini di dalam nash Al-Qur'an. Maka semua tanggung jawab mengadili si

kasus suap ini bukan termasuk dalam hukum qishash atau hadd, melainkan Takzir. Takzir adalah pelanggaran dalam syariat Islam (wajib dan haram)<sup>2</sup>, tetapi belum ditetapkan kadar sanksinya secara syar'i maka diserahkan kepada *Uliil Amri (Qadhi/Khalifah/Hakim)* untuk memberikan sanksinya. karena harta yang diperoleh merupakan harta yang syubhat. Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegahnya dengan tangannya.”

Maksud kata tangan dalam hadits ini adalah kekuasaan. bahwa yang berwenang mencegah kemungkaran sebenarnya adalah para penguasa atau penegak hukum karena merekalah yang mampu menjatuhkan hukuman. Untuk memudahkan *Ulil Amri* dalam memutuskan yang tidak terdapat dalam nash Al Qur'an maupun hadits, maka *Ulil Amri* menetapkan suatu sistem *Al-*

<sup>2</sup> Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam* Juz 5, 177.

Ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*nya, yang artinya: “Jumhur ulama berpendapat bahwa masalah mursalah itu merupakan hujjah syar’i yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian, peristiwa atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nas dan ijma’.

Dilihat dari segala sumber mengenai tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*). Menurut pandangan saya penagturan skor pertandingan sepak bola di indonesia merupakan suatu problematika yang sangat tiidak etis dalam kancah olahraga nasional maupun internasional, Hal itu akan

berdampak pada keberlangsungan serta mendiskreditkan budaya olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas serta semangat juang dari para pemain dan penikmat olahraga sepakbola. Dengan demikian adanya sistem olahraga yang sehat akan membawa kemajuan pada berbagai lini sektor yang lainnya utamanya dalam kemajuan ekonomi, karena olahraga khususnya sepakbola merupakan komoditas atau aset yang sanga berharga bagi negara demi bersaing dengan dunia internasional.

Diharapkan pemerintah penanggapi dengan serius permasalahan ini untuk bisa terus menjaga agar kancah olahraga sepak bola khususnya bisa steril dari para pengacau serta tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.



## PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 71

2. Kemudian Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatar belakangnya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap munculla hpermainan hokum pemutar balikan fakta. Yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Kalau dikaji di dalam Alquran maka akan di dapati 4 ayat yang berkaitan langsung dengan *rishwah*. Satu ayat di surat Al-Baqarah dan tiga ayat di surat Al-Maidah.

## B. Saran

1. Alangkah lebih baiknya aparaturnegara Indonesia menyediakan wadah khusus bagi keohlaragaan di Indonesia yaitu dengan aturan khusus serta memberi pembinaan yang serius dan sistematis di setiap aspek baik itu bagi pemain, penonton, wasit, pelatih dan pengurus serta masyarakat luas. Langkah ini sudah pas menurut penulis karena ini kurang lebih sudah cukup dalam menanggulangi tindak kejahatan ini.
2. Tindak pidana suap dikenai sanksi Takzir berdasarkan kemaslahatan sedang pelaksanaanya diserahkan dalam ijtihad para hakim. Sayyid Sabiq menyebutkan dalam kita Fikih Sunnah:



## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawie, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Budanto Agus, *Delik SuapKorporasi di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- D.gunarsa Singgih, et al, *Psikologi Olahraga: Teori dan Pratik*. Jakarta: gunung mulia, 1996.
- Farid Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- ....., *kaidah-kaidah fikih “kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis”*. kencana, Jakarta 2017.
- Ida Bagus Surya Darma, *Hukum PidanaMateril & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnershi.*, Jakarta: t.p, 2015.
- Irfan M. Nuril dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah.*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ismail Akhmad Irfan, et al,” Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI”, (Bandung-jurnal prosiding ilmu hukum ).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997.
- Lesmana Tjipta, *“Bola Politik dan Politik Bola kemana arah tendangannya?”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- Mansoori Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: UlilAlbaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2010).
- Putra Pranawa Mawada, *Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia*. Skripsi—Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*. pena pundi aksara, 2006.
- Santoso Topo, *asas-asas hokum pidana Islam*. Jakarta: RajawaliPres, 2016.
- Satya Khrisnanda “kasusu sepakbola gajah dalam bingkai media (analisis framing pemberitaan kasus sepakbola gajah antara PSS Sleman dengan PSIS Semarang pada surat kabar harian tribun jogja periode 30 juli 2015-12 agustus 2015)”. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Soekanto Soerjono, “Kriminologi: Suatu Pengantar”. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- ....., *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPres, 2015.
- Susanti Dya Octorina dan A'anEfendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: SinarGrafika, 2014.
- Van HoeveIchtiar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*,Juz 5.
- Ananda Luthfy Avian, “Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, <https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana5693d48e119773750970f220> , diaksestanggal 22 Maret 2019.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an danTerjemah*. diponegoro 2015.
- <https://www.mainbasket.com/r/1347/skandal-pengaturan-pertandingan-match-fixing-dari-siliwangi-sampai-ke-cropa> di aksespadatanggal 2 juni 2019.

